

**KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA DEKONSENTRASI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**GOVERNOR'S ROLE AS A DECONCENTRATION AGENT
IN WEST SULAWESI PROVINCE**



**ANDI MUH MARIO HARING
E012222019**



**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA DEKONSENTRASI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

ANDI MUH MARIO HARING

E012222019



**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA
DEKONSENTRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh
ANDI MUH MARIO HARING
E012222019

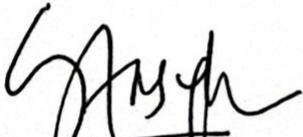
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **3 Desember 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Pembimbing,



Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D
NIP 19481202 198103 1 001

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik,



Dr. Gita Susanti, M.Si
NIP 19640918 198803 2 010

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sulri, SIP., M.Si
NIP 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis berjudul **KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT** adalah benar karya saya sendiri yang disusun di bawah arahan dari tim pembimbing, yaitu Bapak Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D. sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik. Sumber informasi yang dikutip dari karya lain, baik yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, telah disebutkan secara jelas dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka pada tesis ini.

Jika di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi tesis ini merupakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan ini, saya juga melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Desember 2024



ANDI MUH MARIO HARING
E012222019

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini. Tanpa kontribusi dari mereka, penyelesaian tesis ini tidak akan dapat terwujud.

Ucapan terima kasih pertama-tama ditujukan kepada Bapak Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama penulisan tesis ini. Bimbingan Bapak telah memberikan wawasan yang mendalam dan menjadikan penelitian ini lebih baik dari yang penulis bayangkan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si yang telah memberikan izin dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penelitian serta dukungan administrasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan tesis.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan rekan-rekan mahasiswa di Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan yang menyenangkan selama masa studi ini.

Keluarga tercinta, terutama orang tua saya, yang senantiasa memberikan doa, cinta, serta semangat yang tak terhingga, merupakan sumber kekuatan yang tidak ternilai harganya. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang selalu ada dalam setiap langkah penulis.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin. Saya berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi sistem pemerintahan di Indonesia serta pengembangan konsep desentralisasi di masa depan. Mengingat bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Penulis,

Andi Muh Mario Haring

ABSTRAK

Andi Muh Mario Haring. Kedudukan Gubernur sebagai Pelaksana Dekonsentrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Dibimbing oleh Deddy T. Tikson)

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur di Indonesia memiliki kedudukan ganda sebagai kepala daerah yang menjalankan otonomi daerah dan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang melaksanakan dekonsentrasi. Berbagai regulasi telah mengatur kedudukan ini, namun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal alokasi sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pemahaman yang berbeda di kalangan pegawai pemerintah daerah. Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui desain studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum optimal, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Struktur kelembagaan yang mendukung peran tersebut juga masih terbatas, dengan tugas-tugas dekonsentrasi yang sering kali dibebankan pada perangkat daerah tanpa alokasi anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Selain itu, perbedaan pemahaman terkait kedua kedudukan gubernur menambah kompleksitas pelaksanaan tugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan dan peningkatan alokasi sumber daya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan dekonsentrasi. Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi di Indonesia, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

ABSTRACT

Andi Muh Mario Haring. Governor's Role as A Deconcentration Agent in West Sulawesi Province (Supervised by Deddy T. Tikson)

This study aims to analyze the role and implementation of the Governor's duties as the Representative of the Central Government in West Sulawesi Province. Governors in Indonesia have dual roles as regional heads exercising regional autonomy and as representatives of the central government exercising deconcentration. Although this role is regulated by various laws and other regulations, its implementation faces various challenges, especially in terms of resource allocation, institutional coordination, and different understandings among local government employees. This research applied qualitative methods through a case study design. The results indicate that the Governor's role as Representative of the Central Government is not yet optimal, mainly due to limited human resources and budget. The institutional structure supporting the role is also still limited, with deconcentration tasks often assigned to regional apparatus without adequate budget allocation from the central government. In addition, different understandings of the two governor roles add to the complexity of task implementation. This study recommends institutional strengthening and increased resource allocation to support the effective implementation of deconcentration. This study is expected to further contribute to the development of decentralization and deconcentration policies in Indonesia, as well as improving coordination between the central and local governments.

Keywords: Decentralization, Regional Autonomy, Deconcentration, Governor as Representative of the Central Government.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kerangka Konseptual.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	6
2.1 Jenis Penelitian	6
2.2 Prosedur Penelitian.....	6
BAB III PEMBAHASAN	9
3.1 Gambaran Umum.....	9
3.1.1 Pembagian Urusan Pemerintahan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	9
3.1.2 Mekanisme Dekonsentrasi di Indonesia	10
3.1.3 Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.....	12
3.1.4 Tugas dan Wewenang GWPP.....	14
3.1.5 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pelaksana Dekonsentrasi GWPP di Provinsi Sulawesi Barat.....	17
3.2 Hasil Penelitian.....	22
3.2.1 Kedudukan GWPP.....	22
3.2.2 Kelembagaan Perangkat Gubernur.....	25
3.2.3 Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi oleh Perangkat Gubernur ...	28
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka Konseptual	i
2	Jumlah Daerah Otonom di Indonesia.....	12
3	Struktur Perangkat GWPP	13
4	Satuan Kerja Pengelola Dana Dekonsentrasi Tugas GWPP	17
5	Tampilan SIPGWPP	27
6	Tampilan SAKTI	28
7	Tata cara penyusunan RAB dan penginputan SAKTI.....	29

DAFTAR TABEL

1	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	10
2	Jumlah tugas pada setiap Unit Kerja Perangkat Gubernur	39
3	Perbandingan besaran pagu sebelum dan sesudah blokir (rupiah)	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Perangkat GWPP Tahun Anggaran 2024	47
Lampiran 2. SK Perangkat GWPP di Provinsi Sulawesi Barat.....	56
Lampiran 3 - Regulasi di bawah UU yang berkaitan dengan GWPP	67
Lampiran 4 - Pelaksanaan Tugas Atributif GWPP di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.....	74
Lampiran 5 - Surat Keterangan Penelitian.....	85
Lampiran 6 - Draf Policy Brief	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan gubernur di Indonesia diibaratkan seperti dua sisi mata koin. Di satu sisi ia bertindak sebagai pemerintah daerah, di sisi lain bertindak sebagai pemerintah pusat. Kedudukan ganda gubernur ini menunjukkan kerumitan dari pengaturan desentralisasi di Indonesia. Kedudukan tersebut merupakan hasil dari regulasi yang menempatkan daerah otonom dan wilayah administratif secara tumpang tindih. Kebijakan kedudukan ganda gubernur bukan hal yang baru, namun telah ada sejak UU No. 5 Tahun 1974 diterapkan. Sebagai kepala daerah, gubernur memiliki tanggung jawab yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mengembangkan kebijakan yang mendukung otonomi daerah. Sementara itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa kebijakan nasional diimplementasikan dengan baik di daerah dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Banyak negara telah melakukan desentralisasi tetapi tidak sepenuhnya puas dengan hasilnya (Bahl & Bird, 2018). Desentralisasi dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, memungkinkan keputusan yang lebih baik karena dibuat secara lokal daripada dipaksakan oleh pemerintah pusat (Bartlett et al., 2013). Desentralisasi dibentuk oleh konteks sejarah, politik, dan sosio-ekonomi yang unik di masing-masing negara sehingga penerapannya menjadi sangat bervariasi. Dalam penerapannya, sentralisasi dan desentralisasi perlu dipandang sebagai suatu kontinum dan bukan sebuah dikotomi (Cheema & Rondinelli, 1983; Mintzberg, 1979). Oleh sebab itu, tidak ada negara yang tersentralisasi atau terdesentralisasi sepenuhnya. Setiap negara dapat memiliki tingkatan desentralisasi berbeda-beda dalam pemerintahannya.

Pada dasarnya, desentralisasi adalah sebuah konsep organisasi. Oleh karena itu, bidang pertama yang perlu kita tinjau untuk mencari definisi dan konseptualisasi adalah bidang studi organisasi. Mintzberg (1979) menyajikan sebuah analisis klasik, yang mendekati desentralisasi sebagai distribusi kekuasaan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Ia mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut: *“When all the power for decision making rests at a single point in the organization – ultimately in the hands of a single individual – we shall call the structure centralized; to the extent that the power is dispersed among many individuals, we shall call the structure decentralized”* (Mintzberg, 1979: 181). Mintzberg menganggap desentralisasi sebagai parameter desain yang paling rumit dalam struktur organisasi, karena melibatkan beragam sifat kekuasaan dan tantangan kompleks dalam memahaminya.

Rondinelli & Cheema (1983) membagi desentralisasi berdasarkan tingkat atau derajatnya menjadi dekonsentrasi, delegasi, privatisasi, dan devolusi.

Dekonsentrasi adalah bentuk desentralisasi yang paling lemah, dimana pemerintah pusat hanya membantu kantor-kantor perwakilan di luar ibukota negara. Privatisasi mengacu pada penyerahan kewenangan kepada sektor swasta, seperti perbankan Sementara delegasi dan devolusi melibatkan entitas subnasional yang secara politis terpisah dari pemerintah pusat, misalnya pemerintahan daerah. Tingkatan ini dituangkan sebagai asas dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia melalui penetapan UU No. 23 Tahun 2014.

Meskipun UU No. 23 Tahun 2014 telah mendikotomikan tugas dan kewenangan dari kedua kedudukan gubernur, namun tidak ada pernyataan yang menegaskan pengaturan kelembagaan dan sumber daya yang digunakan. Akibatnya, muncul berbagai kendala dalam memahami peran GWPP di daerah dan bagaimana tugas dan wewenangnya dilaksanakan. Permasalahan ini semakin rumit ketika GWPP tidak memiliki pegawai dan sumber dayanya sendiri dan cenderung bergantung pada pemerintah daerah provinsi. Kondisi ini menimbulkan kekacauan pada pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai daerah otonom karena harus dibebankan urusan pemerintah pusat.

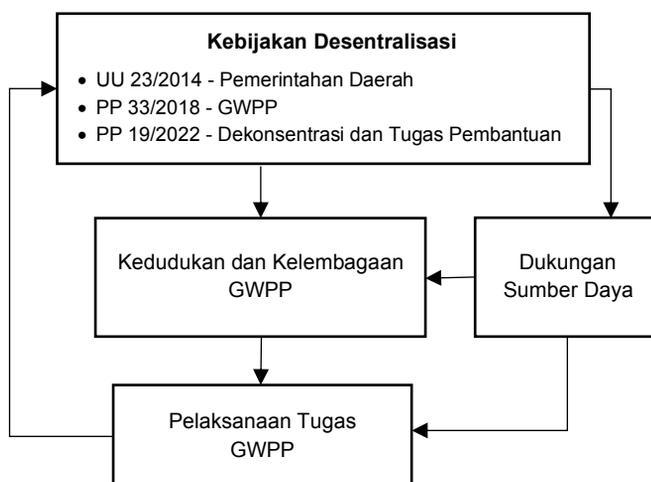
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran GWPP. Aritonang (2016) menyatakan bahwa ketidakjelasan antara dekonsentrasi dan desentralisasi berdampak pada hubungan antar tingkat pemerintahan. Hadi (2010) mengemukakan bahwa bupati/wali kota hanya melihat implementasi dari kedudukan gubernur sebagai kepala daerah sehingga mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewenangan yang sama dengan gubernur. Nuriani (2019) menekankan bahwa pelaksanaan tugas GWPP terhambat oleh kendala waktu, sumber daya manusia, dan keuangan. Dharma & Khairani (2022) menyimpulkan bahwa kedudukan GWPP tidak memiliki legitimasi dari UUD yang menimbulkan konsekuensi politik yang signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kumendong (2023) dan Nugraha (2021), ditemukan bahwa kemampuan gubernur dalam melaksanakan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat terhalang oleh berbagai ambiguitas kelembagaan dan proses politik yang rumit yang mengakibatkan ketidakteraturan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian-penelitian ini menekankan pentingnya mengatasi keterbatasan struktural dan institusional untuk meningkatkan efektivitas kedudukan GWPP.

Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji kendala yang dihadapi oleh GWPP, namun sebagian besar hanya berfokus pada definisi dari dekonsentrasi dan devolusi, serta kajian yuridis terhadap kedudukan gubernur dalam peraturan perundang-undangan. Masih minimnya penelitian dengan fokus analisis pada pengaturan kelembagaan dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas GWPP. Analisis ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektifitas dan akuntabilitas GWPP dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya hal ini didasarkan oleh pernyataan Burki et al. (1999) yang menekankan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Rondinelli & Cheema (1983) yang menekankan pentingnya memahami berbagai bentuk desentralisasi agar dapat memahami fungsi dan tujuannya dengan lebih baik. Selain itu, Pollitt

(2005) menyoroti pentingnya pemahaman kompleksitas kelembagaan dan koordinasi antarpemerintah dalam proses reformasi administrasi publik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka kelembagaan dan alokasi sumber daya yang diatur oleh pemerintah pusat terhadap GWPP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap pelaksanaan tugas kinerja GWPP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem pemerintahan Indonesia dan perkembangan studi desentralisasi kedepannya.

1.2 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada gambar di atas menjelaskan hubungan antara kebijakan desentralisasi, kedudukan GWPP, dan pelaksanaan tugasnya. Secara garis besar, kerangka ini menggambarkan bagaimana kebijakan desentralisasi berpengaruh pada struktur kelembagaan dan peran gubernur, yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. UU No. 23 tahun 2014 menegaskan bahwa gubernur memiliki dua kedudukan, yakni pelaksana otonomi daerah dan pelaksana dekonsentrasi. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, namun gubernur tetap memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Dalam kerangka ini, kebijakan desentralisasi tidak hanya memengaruhi otonomi daerah, tetapi juga peran Gubernur dalam menjalankan fungsi dekonsentrasi.

Selanjutnya, kedudukan dan kelembagaan GWPP sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang mencakup anggaran, personel, dan infrastruktur berperan penting dalam mendukung kapasitas gubernur untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ketentuan PP No. 19 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut mengenai sumber daya dan dukungan pusat terhadap GWPP. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, gubernur dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat.

Pelaksanaan tugas GWPP pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan desentralisasi dan dukungan sumber daya diimplementasikan. Tugas-tugas ini diatur dalam PP No. 33 Tahun 2018 yang mencakup pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan program-program pusat di daerah. Hubungan timbal balik antara elemen-elemen ini menggambarkan pentingnya sinergi antara kebijakan desentralisasi, kelembagaan, dan sumber daya untuk memastikan tugas GWPP dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

1.3 Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena empiris peranan GWPP dan perangkatnya dalam menyelenggarakan dekonsentrasi. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada Unit Kerja Perangkat Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, struktur kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan pembiayaan juga menjadi aspek penting yang analisis dalam penelitian ini.

b) Manfaat

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan desentralisasi, terutama terkait dengan konstruksi kedudukan, peran, dan fungsi GWPP di wilayah provinsi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara detail kontribusi tersebut meliputi:

1) Kontribusi Akademik

- Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur tentang administrasi publik, khususnya dalam konteks kedudukan GWPP.
- Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi, keuangan, dan kelembagaan yang mendukung implementasi kebijakan pusat di tingkat provinsi.

2) Kontribusi Praktis

- Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembuat kebijakan tentang tantangan dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat provinsi.

- Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas regulasi, pengelolaan keuangan, serta struktur, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia di provinsi.
 - Membantu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana dan implementasi kebijakan di tingkat provinsi.
- 3) Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat
- Mengedukasi masyarakat tentang peran dan fungsi GWPP, serta pentingnya kebijakan pusat dalam pengelolaan dan pembangunan di tingkat provinsi.
 - Memperluas pengetahuan masyarakat tentang struktur kelembagaan pemerintahan di tingkat provinsi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Creswell & Creswell (2022), adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendalami permasalahan sosial atau manusia. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman ditekankan pada proses dan signifikansi yang tidak selalu dapat diukur melalui aspek kuantitas seperti jumlah, intensitas, atau frekuensi. Pendekatan ini melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek penelitiannya (Lincoln & Denzin, 2003). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Yin (2018) menyatakan bahwa desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus yang dipilih, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, karena fokus pada kasus nyata, desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami konteks di mana fenomena terjadi, sehingga memperkaya interpretasi temuan penelitian. Dalam topik kedudukan GWPP di wilayah provinsi, peneliti memilih “pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP di Provinsi Sulawesi Barat” sebagai kasus yang akan diteliti karena pertimbangan ketersediaan data yang memadai dan kemudahan proses pengumpulan data.

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dapat dibagi menjadi tiga kasus: kedudukan, kelembagaan (termasuk personel dan dukungan anggaran), pelaksanaan tugas. Kasus-kasus ini dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur di Provinsi Sulawesi Barat secara komprehensif.

2.2 Prosedur Penelitian

2.2.1 Narasumber/Informan

Narasumber/informan dalam penelitian ini meliputi berjumlah 19 orang yang meliputi: (1) pegawai pada Perangkat Daerah yang secara *ex-officio* bertugas pada Perangkat Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat, (2) pegawai pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; serta (3) Tenaga Lepas Pengolah Data dan Administrasi pada Sekretariat Gubernur.

2.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dapat diperoleh melalui sumber dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, rekaman arsip, dan informasi media sosial (Creswell & Creswell, 2022; Yin, 2018). Adapun data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan telaah dokumen.

- a. *Content analysis*. Peneliti menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan kedudukan, peran dan fungsi gubernur dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan semistructured terhadap narasumber/informan terpilih.
- c. Observasi langsung. Observasi dilakukan secara langsung pada Kantor Sekretariat Gubernur dan Kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi GWPP.

2.2.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, prosedur analisis data menjadi sangat penting untuk memahami data kualitatif yang komprehensif, detail, dan kompleks yang dikumpulkan. Beberapa langkah kunci dalam teknik analisis data meliputi:

- a. Mengorganisir dan menyiapkan data. Langkah awal ini melibatkan strukturisasi data agar memudahkan analisis. Ini mungkin termasuk mentranskripsi wawancara, mengorganisir dokumen, dan menyiapkan data untuk proses pengkodean.
- b. Membaca data secara awal. Peneliti melakukan pembacaan awal terhadap data untuk mendapatkan pemahaman umum tentang konten dan konteksnya.
- c. Pengkodean data. Pengkodean melibatkan kategorisasi dan pelabelan secara sistematis terhadap segmen data berdasarkan tema, konsep, atau pola. Proses ini membantu dalam mengorganisir data untuk analisis lebih lanjut.
- d. Mengembangkan deskripsi dan analisis tematik. Setelah melakukan pengkodean data, peneliti mengembangkan deskripsi dari segmen yang dikodekan dan melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama atau pola dalam data.
- e. Merepresentasikan temuan. Peneliti merepresentasikan temuan menggunakan tabel, grafik, gambar, atau alat visual lainnya untuk mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif.
- f. Menginterpretasikan temuan. Interpretasi data melibatkan membuat kesimpulan, membandingkan temuan dengan literatur yang ada, mendiskusikan implikasi, dan menghasilkan wawasan berdasarkan hasil analisis.

- g. Memvalidasi temuan: Peneliti dapat menggunakan strategi untuk memvalidasi akurasi dan reliabilitas temuan.

2.2.4 Validitas dan Reliabilitas

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data adalah melalui penerapan triangulasi data. Triangulasi data memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan informasi untuk mengonfirmasi temuan dan interpretasi yang diperoleh, sehingga memperkuat validitas temuan dan meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.